

**STRATEGI MITIGASI BENCANA KEKERINGAN OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN
PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Annisa Fatimatul Firdausi Putri

NPP. 32.0509

Asdaf Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email : annisaputri21.ap@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Sulthon Rohmadin, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): Pamekasan Regency is classified as a drought-prone area with a significant number of affected villages and hamlets each year. **Purpose:** This study aims to analyze the mitigation strategies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pamekasan Regency in addressing drought disasters, as well as to identify the inhibiting factors and efforts made to overcome these obstacles. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The theoretical framework is based on Jack Kooten's (2006) strategic model, which includes organizational strategy, program strategy, resource strategy, and institutional strategy. **Result:** The findings indicate that BPBD Pamekasan has implemented various mitigation efforts such as providing clean water, mapping vulnerable areas, conducting public education, and coordinating with relevant agencies. The main obstacles include limited funding, inadequate facilities and infrastructure, and low community awareness regarding disaster mitigation. **Conclusion:** BPBD seeks to overcome these challenges through cross-sector collaboration, capacity building, and strengthening public education. This study is expected to serve as a reference for local governments to enhance the effectiveness of sustainable drought disaster mitigation strategies.

Keywords: Mitigation strategy, drought, BPBD, natural disaster, Pamekasan

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Pamekasan merupakan wilayah yang rawan kekeringan dengan jumlah desa dan dusun terdampak yang cukup signifikan setiap tahunnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan dalam menghadapi bencana kekeringan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori strategi yang digunakan dalam penelitian ini

mengacu pada teori Jack Kooten (2006) yang mencakup strategi organisasi, program, sumber daya, dan kelembagaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan strategi mitigasi melalui penyusunan program seperti penyediaan air bersih, pemetaan daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Adapun faktor penghambatnya antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap mitigasi bencana. **Kesimpulan:** BPBD berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan menjalin kerja sama lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas strategi mitigasi bencana kekeringan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Strategi mitigasi, kekeringan, BPBD, bencana alam, Pamekasan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan strategis dunia, yaitu di pertemuan antara dua benua besar, Asia dan Australia, serta dua samudera utama, Hindia dan Pasifik. Letak geografis ini menyebabkan Indonesia mengalami pengaruh musim yang cukup khas, yaitu adanya musim kemarau dan musim penghujan, yang dipengaruhi oleh angin muson Asia yang bertiup dari November hingga Maret dan angin muson Australia yang bertiup dari Mei hingga Oktober. Musim-musim tersebut juga menyebabkan perubahan iklim yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya. Secara fisik, Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan wilayah daratan yang sangat luas. Kondisi ini menempatkan Indonesia di wilayah yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam. Letaknya di zona Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, menyebabkan wilayah Indonesia sangat rentan terhadap bencana geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, bencana hidro-klimatologis seperti banjir, kekeringan, angin kencang, dan tanah longsor juga sering terjadi. Perubahan iklim yang semakin ekstrem pun memperparah frekuensi dan intensitas bencana tersebut, terutama yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di wilayah kepulauan.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, maupun manusia, yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Laporan World Risk Report 2023 mencatat adanya 421 kejadian bencana di dunia sejak tahun 2022, dengan sekitar 80% di antaranya terkait dengan dampak perubahan iklim. Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dalam hal risiko bencana dengan skor World Risk Index sebesar 43,5 dari 100, yang menunjukkan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Dalam menghadapi risiko tersebut, Indonesia melalui pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertugas melakukan penanggulangan dan mitigasi bencana. Seperti yang dikatakan oleh .Data BNPB menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5.400 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Bencana kebakaran hutan

menjadi yang paling dominan dengan 2.051 kejadian, diikuti oleh cuaca ekstrem sebanyak 1.261 kejadian, dan banjir sebanyak 1.255 kejadian. Bencana-bencana ini telah menyebabkan 275 orang meninggal dunia, lebih dari 27.000 orang terluka, dan mengakibatkan lebih dari 8 juta orang harus mengungsi atau terdampak langsung.

Memasuki tahun 2024, berdasarkan laporan BPBD hingga Juni, sudah terjadi 891 bencana, dengan mayoritas (98,77%) merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, longsor, dan kebakaran hutan, sedangkan sisanya (1,23%) merupakan bencana geologi. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana karena kondisi topografinya yang didominasi pegunungan dan pesisir, serta populasi yang padat. Di Jawa Timur terdapat dua tipe cuaca ekstrem, yaitu musim penghujan yang menyebabkan banjir dan longsor (ekstrem basah) dan musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan (ekstrem kering). Kekeringan di Jawa Timur menjadi perhatian utama karena debit air yang rendah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekeringan sendiri dibagi dalam beberapa jenis, antara lain kekeringan meteorologis, agrikultur, hidrologis, dan sosial ekonomi. Jenis kekeringan meteorologis yang paling banyak terjadi di wilayah ini terkait dengan menurunnya curah hujan akibat fenomena El Nino yang mengganggu proses pembentukan awan hujan. Akibatnya, terjadi penurunan curah hujan secara signifikan di wilayah pesisir yang berpengaruh terhadap ketersediaan air.

Dalam 20 tahun terakhir, tercatat ada 331 kejadian kekeringan di Jawa Timur yang telah berdampak pada sekitar 1,5 juta jiwa masyarakat. Wilayah ini memiliki musim kemarau yang lebih panjang dan curah hujan yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, sehingga rawan kekeringan. Pada tahun 2023, berdasarkan data dari BPBD Jawa Timur, terdapat 27 kabupaten/kota yang terdampak kekeringan dengan 844 desa/kelurahan masuk kategori kering kritis, sangat kering, hingga kering langka. Salah satu kabupaten yang paling sering terdampak adalah Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura. Dari 13 kecamatan di Pamekasan, sebanyak 11 kecamatan mengalami dampak kekeringan dengan 75 desa dan 269 dusun yang masuk dalam kategori kering langka dan kering kritis. Kecamatan Baturmarmar tercatat sebagai wilayah yang paling parah terdampak dengan 34 desa masuk kategori kering kritis. Dalam kondisi ini, kebutuhan air per orang per hari sangat terbatas, hanya 5 hingga 10 liter, jauh di bawah standar kebutuhan minimal 50 liter per orang per hari menurut WHO.

Dampak kekeringan ini sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomi, menurunnya produksi pertanian seperti padi dan tembakau menjadi masalah besar karena sektor ini merupakan sumber pendapatan utama warga. Kekeringan menyebabkan gagal panen, sehingga pendapatan petani menurun drastis. Dari segi sosial, kekurangan air bersih sering memicu konflik antar warga yang berebut sumber air. Sedangkan dari sisi kesehatan, kekurangan air bersih menurunkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan risiko penyakit. Sebagai upaya mitigasi jangka pendek, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui BPBD memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Tindakan ini sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan dan bantuan saat terjadi bencana. Namun, bantuan ini hanya solusi sementara. Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, diperlukan strategi mitigasi bencana yang komprehensif dan berkelanjutan agar dampak kekeringan dapat diminimalisir sebelum terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai strategi mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi nyata bahwa daerah tersebut termasuk wilayah yang sangat rawan mengalami bencana kekeringan secara berulang setiap tahunnya. Meskipun berbagai upaya mitigasi telah dilakukan oleh BPBD, masih terdapat sejumlah kendala signifikan yang menghambat efektivitas pelaksanaan mitigasi tersebut. Kesenjangan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini terletak pada kurang optimalnya aspek pelaksanaan atau *actuating* dalam manajemen bencana kekeringan, di mana belum ada penanggung jawab khusus yang memadai untuk mengkoordinir sistem tanggap darurat secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, evaluasi dan penyempurnaan sistem tanggap darurat yang ada belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh sehingga menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi potensi bencana kekeringan yang semakin kompleks. Sistem peringatan dini yang selama ini diterapkan juga belum mampu menjangkau seluruh wilayah terdampak secara efektif, begitu pula dengan komunikasi antar lembaga dan dengan masyarakat yang masih kurang optimal, sehingga berdampak pada respons mitigasi yang terlambat dan tidak tepat sasaran.

Di samping itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, juga menjadi hambatan utama yang mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas program mitigasi. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek identifikasi daerah rawan bencana, jenis-jenis kekeringan, dan upaya mitigasi secara umum di beberapa wilayah lain, sehingga masih terdapat kekurangan dalam mengkaji secara mendalam strategi pelaksanaan mitigasi yang efektif dan adaptif di Kabupaten Pamekasan, termasuk faktor penghambat dan solusi yang sudah atau dapat diupayakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana strategi mitigasi bencana kekeringan disusun dan dijalankan oleh BPBD Kabupaten Pamekasan, apa saja kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan strategi tersebut, serta upaya-upaya konkret yang telah dan sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur mengenai dinamika pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan model manajemen kebencanaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memiliki nilai strategis untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih responsif terhadap kondisi lokal, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan faktor lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam kajian akademik, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat serta lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Pamekasan secara khusus dan daerah rawan kekeringan pada umumnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada lima penelitian sebelumnya yang memiliki tujuan, metode, dan masalah yang mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pertama, penelitian oleh Merintha Suryapusita, Anggara Setya Saputra, Suryoto, dan Nidya Ayu Wulandari Ramdan (2022) dengan judul "Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro". Penelitian ini bertujuan mengkarakterisasi dan mengidentifikasi praktik penanggulangan bencana oleh

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa BPBD Bojonegoro melakukan upaya seperti pembuatan sumur bor, fasilitas pengolahan air, pembangunan waduk, geo membran, jaringan pipa air, toren air, dan melakukan sosialisasi serta promosi konservasi air.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fetria Septiarum, Maesaroh, dan Nina Widowati (2023) dengan judul "Manajemen Mitigasi Bencana oleh BPBD dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan di Kabupaten Boyolali". Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Boyolali serta faktor penghambatnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali masih menghadapi kendala pada aspek penggerakan (*actuating*), antara lain tidak adanya penanggung jawab koordinasi sistem tanggap darurat, sistem tanggap darurat yang tidak dievaluasi berkala, serta sistem peringatan dini dan komunikasi yang kurang memadai.

Penelitian ketiga adalah oleh Rivi Neritarani (2019) yang berjudul "Identifikasi dan Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan Potensial di Kabupaten Semarang". Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sebaran area rawan kekeringan, menganalisis jenis kekeringan, dan mengetahui manajemen yang tepat, menggunakan metode *weighted overlay*. Hasil penelitian berupa peta sebaran daerah rawan kekeringan hidrologis dan rekomendasi manajemen bencana berupa program pengendalian dan pelestarian sumber daya air serta penyadaran pentingnya air dan kondisi wilayah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Desifa Ramdani Minhar dan Faizal Aco (2021) dengan judul "Mitigasi Bencana dalam Mengatasi Kekeringan di Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman". Penelitian deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan, bentuk program, dan strategi yang dilaksanakan berbeda antar wilayah. Pemerintah menggunakan strategi pemetaan, penyebaran informasi, pemantauan, pelatihan dan pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, dan peringatan dini. Upaya mitigasi dilakukan dengan *drooping* air, pemanfaatan sumber mata air, sumur bor, reboisasi, bak penampungan air, PDAM, dan PAMSIMAS.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Arwan Rosyadi, Khaled Abdan, Willa Amanda Fricillya, Husniatun Nufus, Jannatul Fitrah, Lalu Rizki Aji Kertalam, Mirnawati, Rizka Amelia Putri, Ilza Lail Fatul Janna, dan Maulana Ananda Sami (2024) dengan judul "Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Kekeringan di Desa Salur Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara". Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis data secara induktif dengan akses data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari program mitigasi bencana gempa bumi dan kekeringan dilakukan melalui sosialisasi mengenai mitigasi bencana, penanaman pohon di daerah rawan kekeringan, dan pembuatan rambu jalur evakuasi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian dengan judul "Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur" memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Merintha Suryapuspita, Anggara Setya Saputra, Suryoto, dan Nidya Ayu Wulandari Ramdan (2022) hanya menekankan pada strategi yang dilakukan oleh BPBD itu sendiri; Fetria Septiarum, Maesaroh, dan Nina Widowati (2023) lebih menekankan pada kualitas manajemen bencana pada aspek *actuating* pada upaya mitigasi bencana.; Rivi Neritarani (2019) lebih mengacu pada kegiatan

mitigasi non-struktural; Desifa Ramdani Minhar dan Faizal Aco (2021) menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kenijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap wilayah itu berbeda; Muhammad Arwan Rosyadi, Khaled Abdan, Willa Amanda Fricillya, Husniatun Nufus, Jannatul Fitrah, Lalu Rizki Aji Kertalam, Mirnawati, Rizka Amelia Putri, Ilza Lail Fatul Janna, dan Maulana Ananda Sami (2024) menunjukkan kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan lebih mengacu pada mitigasi non-struktural kecuali pada program penanaman pohon.

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menelaah secara komprehensif strategi mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan teori strategi Jack Kooten yang mencakup empat dimensi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan menitikberatkan pada implementasi nyata strategi yang terstruktur dan terencana sesuai visi dan misi BPBD, termasuk program unggulan seperti BESTI BERDERING yang merupakan inovasi lokal dalam pendistribusian air bersih dan pembuatan sumur bor serta sumur resapan untuk mengatasi kekeringan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan internal dan eksternal secara detail, seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, tenaga manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan dampak penambangan ilegal yang mengganggu siklus hidrologi, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara mendalam. Upaya yang dilakukan BPBD untuk mengatasi hambatan tersebut melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan edukasi masyarakat juga menjadi fokus kajian baru yang memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan strategi mitigasi bencana di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang penting sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dan praktisi kebencanaan dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana kekeringan secara berkelanjutan di Kabupaten Pamekasan

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk meneliti kondisi objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan menggabungkan beberapa metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif dan menekankan pada makna serta pemahaman terhadap fenomena yang diteliti daripada pada generalisasi hasil. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang sedang terjadi dengan tujuan menjelaskan apa yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme ataupun interpretatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, observasi terhadap fenomena yang terjadi, serta dokumentasi berupa pengumpulan arsip, laporan, dan foto yang mendukung penelitian. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap strategi mitigasi bencana kekeringan yang ada.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2025 dengan beberapa informan yang membantu memberikan keterangan pada penelitian ini.. Penelitian ini terdiri dari 19 informan yaitu diantaranya, Plt.Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan, Kepala Seksi Distribusi PDAM Kabupaten Pamekasan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Kepala Bidang Produksi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pamekasan, dan masyarakat terdampak yang berjumlah sepuluh orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan

Strategi secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana jangka panjang yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi tentu memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dan strategi yang digunakan masing-masing organisasi pasti berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep strategi menurut Kooten dalam Salusu (2006:104). Menurut Kooten, strategi terdiri dari empat tipe sebagai berikut:

- Strategi Organisasi
- Strategi Program
- Strategi Sumber Daya
- Strategi Kelembagaan

3.1.1 Strategi Organisasi

Strategi organisasi menurut Kooten merupakan jenis strategi yang berkaitan dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi dan misi organisasi memengaruhi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Dalam penelitian ini, strategi yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tujuan mitigasi bencana kekeringan dipengaruhi oleh visi dan misi dari BPBD itu sendiri. Visi dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan yaitu sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melindungi masyarakat Kabupaten Pamekasan dari bencana melalui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dapat terwujud. Strategi organisasi menjadi pedoman arah untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan, Bapak Akhmad Dhofir Rosidi, S.STP pada tanggal 7 Januari 2025 dijelaskan bahwa:

“Berdasarkan visi dan misi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka strategi pertama yang dilakukan dalam program kegiatan mitigasi bencana ini adalah menentukan atau merumuskan perencanaan strategis yang dapat mendukung dan mempermudah kegiatan mitigasi bencana yang dalam hal ini adalah mitigasi bencana kekeringan. Perencanaan ini dilakukan dengan mengembangkan program mitigasi berbasis data seperti pemetaan wilayah kekeringan agar intervensi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.”

Perencanaan lainnya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya untuk mendukung program mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Koordinasi ini dilakukan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terkait rencana penyediaan air bersih bagi daerah terdampak kekeringan. Kepala Seksi Distribusi PDAM Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Biasanya BPBD melakukan pengumpulan data terlebih dahulu terkait daerah-daerah kering, kemudian dari pihak BPBD mengirimkan MOU dan Surat Keputusan Bupati terkait daerah-daerah kering tersebut untuk selanjutnya diberikan tindakan pendistribusian air bersih oleh kami PDAM. Setelah adanya perjanjian dan data yang jelas, kami melakukan perencanaan dan pengaturan jadwal untuk pendistribusian air ke titik-titik daerah kering yang telah ditentukan.”

Dari wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri maupun yang melibatkan lembaga lain telah dilakukan secara matang dan terencana, yang dibuktikan dengan adanya pemetaan wilayah daerah rawan kekeringan serta Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pamekasan yang menunjukkan data-data terkait daerah-daerah kering dan pengklasifikasiannya tentang jenis kekeringan, baik itu kering langka maupun kering kritis.

3.1.2 Strategi Program

Strategi program merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang disusun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang berupa program atau kegiatan yang disusun secara terstruktur. Program dapat berupa tindakan atau pembuatan proyek yang disusun untuk mengentaskan suatu masalah dan mencapai tujuan. Strategi program mencakup pengaturan langkah-langkah, waktu, alokasi sumber daya dan anggaran, serta evaluasi agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Strategi program dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi dan program-program yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mitigasi bencana kekeringan. Program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan perlindungan bencana kekeringan. Program-program yang

dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pamekasan bertujuan mencegah meningkatnya angka bencana kekeringan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Beberapa program yang telah dilakukan adalah:

- Program "BESTI BERDERING" (Bersama Bupati Bereskan Desa Kering), yang dicetuskan oleh mantan Bupati Kabupaten Pamekasan, Bapak Baddrut Tamam pada September 2024. Program ini berupa pendistribusian bantuan air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan.
- Pembuatan sumur bor dan sumur resapan.
- Reboisasi untuk menambah daerah resapan air.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Akhmad Dhofir Rosidi, S.STP menyatakan pada tanggal 8 Januari 2025:

“Untuk program mitigasi kekeringan sendiri sudah ada beberapa program maupun kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah setempat dengan BPBD. Program itu salah satunya yaitu program yang diberi nama BESTI BERDERING... Kemudian program lainnya yaitu seperti pembuatan sumur bor dan sumur resapan, serta reboisasi untuk menambah daerah resapan air.”

Program-program ini telah berjalan dan merupakan jenis mitigasi yang terstruktur dan terencana secara baik.

3.1.3 Strategi Sumber Daya

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu sumber daya alam, teknologi, maupun sumber daya yang bersumber dari manusia. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan berkelanjutan penting agar memastikan kesejahteraan manusia dan mendukung keberlangsungan berjalannya suatu organisasi. Tujuan suatu organisasi dapat tercapai apabila terdapat peran dari sumber daya yang ada. Mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan melibatkan sumber daya di dalamnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia (man), mesin (machine), bahan (material), metode (method), dan anggaran (money). Hal tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal ini adalah program mitigasi bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pemanfaatan sumber daya pada program mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan ini dimulai pada mengaktifkan peran sumber daya manusia yang ada di BPBD itu sendiri dalam hal ini adalah para pegawai dan staf. Peran pegawai maupun staf dalam hal ini yang banyak berperan terjun langsung kepada masyarakat yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim Reaksi Cepat (TRC) banyak berperan dalam kegiatan yang turun langsung pada masyarakat seperti pendistribusian air bersih dan pembuatan sumur bor.

Tim Reaksi Cepat (TRC) memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

sehingga masyarakat mengapresiasi pelayanan dari BPBD tersebut. Hal ini telah disampaikan langsung oleh salah satu masyarakat terdampak yang berada di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan, Bapak Rahman pada tanggal 18 Januari 2025 yang mengatakan bahwa:

“Pelayanan dari tim BPBD Kabupaten Pamekasan terhadap masyarakat telah banyak membantu masyarakat dalam mencegah kekeringan mulai dari pendistribusian air bersih, adanya sumur bor yang digunakan untuk menyimpan air dan sumber air alternatif saat terjadi kekeringan”

Sumber daya selanjutnya yang digunakan dalam program mitigasi bencana kekeringan adalah sarana dan prasarana yang memadai, seperti mobil tangki untuk pendistribusian air yang dipinjamkan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, anggaran juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi agar dapat berjalan sesuai rencana. Pengelolaan sumber daya tersebut harus dilakukan secara matang agar tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan tepat sasaran.

3.1.4 Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan merujuk pada rencana yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai visi atau tujuan suatu organisasi. Elemen penting dalam strategi kelembagaan termasuk pembentukan visi dan misi yang jelas, penyusunan kebijakan yang mendukung tujuan strategis, dan juga pengembangan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan demikian, tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan institusi lain dalam program mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar program mitigasi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran serta dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari bencana kekeringan tersebut.

Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Bentuk kerja sama antara BPBD dan PDAM misalnya adalah pendistribusian air kepada masyarakat yang dilakukan oleh PDAM. Kerja sama ini dilakukan dengan prosedur dan perencanaan matang, di mana BPBD mengirimkan MoU dan surat keputusan Bupati yang berisi informasi mengenai daerah-daerah rawan kekeringan. Selanjutnya PDAM mengolah data tersebut dan mengatur jadwal pendistribusian air. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan data penyakit yang ditimbulkan akibat kekeringan seperti diare, ISPA, dan DBD, sehingga penanggulangan dapat dilakukan secara terpadu.

3.2 Faktor Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

Mitigasi bencana merupakan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini mitigasi bencana kekeringan. Pada implementasinya, saat pelaksanaan program mitigasi bencana tersebut dijalankan tentu

terdapat hambatan-hambatan yang menghambat jalannya program mitigasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam lembaga atau organisasi itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal merupakan hambatan yang bersumber dari luar organisasi atau lembaga.

1. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam organisasi atau lembaga itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan melakukan program mitigasi bencana dalam hal ini yaitu bencana kekeringan. Dalam pelaksanaannya tentu BPBD mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan programnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan, Bapak Akhmad Dhofir Rosidi pada tanggal 14 Januari 2025, dijelaskan bahwa:

“Kalau untuk hambatannya sendiri yang utama itu adalah minimnya anggaran. Untuk melakukan mitigasi bencana itu membutuhkan banyak anggaran, namun karena anggarannya terbatas kami dari pihak BPBD tidak bisa melakukan banyak hal lebih sehingga program yang kami jalankan juga terbatas namun tetap kami usahakan untuk program mitigasi ini tetap berjalan optimal dengan jalan alternatif yang lain.”

Kurangnya anggaran menjadi faktor penghambat utama yang menjadi tantangan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan melakukan program mitigasinya. Namun menurut penjelasan yang telah disampaikan, pihak BPBD tetap akan melakukan program mitigasinya dan mengusahakan agar berjalan optimal dengan mencari jalan alternatif lain untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Selain kurangnya anggaran, terdapat juga hambatan lain yang menjadi penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan program mitigasinya, yaitu kurangnya sarana prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Pamekasan. Hal ini juga telah dijelaskan secara langsung oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pamekasan, Bapak Akhmad Dhofir Rosidi, S.STP yang mengatakan bahwa:

“Selain anggaran, BPBD juga kekurangan sarana prasarana. Contohnya yaitu kurangnya gudang penyimpanan peralatan BPBD sehingga alat-alat yang akan digunakan untuk menyimpannya saja kami meminjam ruangan kosong di sebelah kantor untuk sementara. Kebetulan dikarenakan kantor yang saat ini merupakan bangunan baru yang baru saja pindah dari kantor yang lama. Kemudian juga kurangnya angkutan mobil tangki karena di BPBD mobil tangki yang tersedia hanya berjumlah 3 unit.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjelaskan bahwa kurangnya angkutan mobil tangki yang ada di BPBD yaitu hanya berjumlah 3 unit. Tentu kurangnya sarana prasarana tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelayanan BPBD kepada masyarakat terutama pada program pendistribusian air bersih. Hal tersebut terjadi karena proses pendistribusian pada setiap daerah menjadi lebih lama karena harus bergantian. Berikut data sarana prasarana BPBD Kabupaten Pamekasan yang mendukung paparan hambatan internal tersebut:

Tabel 1.
Data Aset Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Pamekasan

No	Nama Barang	Jumlah
1	A.C. Split	1
2	AC Unit	4
3	Alat Besar Apung Lainnya	4
4	Alat Kantor Lainnya	3
5	Alat Kantor Lainnya Lainnya	2
6	Alat Komunikasi Radio SSB	1
7	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1
8	Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	2
9	Alat SAR Lainnya	10

Selain itu, faktor penghambat internal lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia, khususnya tenaga bantuan seperti Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pamekasan yang berpengaruh pada efektivitas kegiatan kebencanaan. Jumlah tenaga TRC non-ASN yang hanya berjumlah tujuh orang menyebabkan kekurangan sumber daya apabila terjadi bencana yang cukup padat. Kekurangan tenaga ini menyebabkan kurang cepatnya penanganan dan cakupan wilayah yang dapat dijangkau, serta beban kerja yang tinggi pada anggota TRC yang ada, yang berpotensi menurunkan efektivitas dan keselamatan kerja mereka sendiri.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang bersumber dari luar organisasi atau lembaga itu sendiri. Hambatan eksternal yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan bencana. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana mengantisipasi dan mencegah terjadinya bencana. Dalam upaya mitigasi bencana kekeringan ini, masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat yang sulit dikendalikan. Masyarakat masih belum paham bagaimana cara mencegah terjadinya bencana, seperti masih banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan air dengan bijak. Hambatan eksternal yang kedua yaitu banyaknya penambangan pasir dan batu yang terjadi di daerah-daerah yang berdekatan dengan daerah rawan kekeringan. Penambangan yang berlebihan dapat berkontribusi terhadap terjadinya bencana kekeringan. Penambangan-penambangan yang dilakukan secara berlebih dapat mengakibatkan gangguan terhadap siklus hidrologi. Siklus hidrologi yang dimaksud yaitu adanya penambangan pasir yang dilakukan di daerah sungai dapat menyebabkan berubahnya aliran air dan mengurangi kapasitas sungai dalam menyimpan air sehingga mempercepat aliran air hujan ke hilir tanpa terserap ke dalam tanah. Selain itu, penambangan juga dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, kerusakan vegetasi, dan tanah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aktivitas penambangan pasir atau batu yang tidak terkontrol dapat mempercepat kekeringan dengan mengganggu keseimbangan ekosistem air dan mengurangi ketersediaan air dalam tanah.

3.3 Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan dari BPBD Kabupaten Pamekasan, bahwa dalam melaksanakan mitigasi bencana kekeringan tentu tidak lepas dari berbagai hambatan atau kendala yang terjadi. Hambatan yang terjadi tentu menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas dari strategi mitigasi bencana kekeringan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut merupakan penjabaran dari upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pamekasan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan:

Tabel 2.
Upaya BPBD Kabupaten Pamekasan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kekeringan

Hambatan	Upaya yang Dilakukan BPBD
Keterbatasan Anggaran	– Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga lain baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk bantuan dan dukungan anggaran dalam kegiatan mitigasi kekeringan
Keterbatasan Sarana dan Prasarana	– Melakukan kerja sama dengan PDAM, Dinas Kesehatan, dan DKPP terkait peminjaman fasilitas dan peralatan seperti mobil tangki air untuk pendistribusian air bersih
	– Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana pendukung melalui Musrenbang
Kesadaran Masyarakat yang Rendah terhadap Mitigasi Bencana Kekeringan	– Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala mengenai pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan
	– Mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan serta dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Pamekasan telah berupaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan. Adanya upaya kerja sama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah menjadi salah satu solusi dalam keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu, dalam mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat, BPBD melakukan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan serta mengajak tokoh masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan berbagai strategi mitigasi bencana kekeringan berdasarkan empat aspek strategi Jack Kooten, yakni strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi ini mencakup penyusunan visi, misi, tujuan organisasi; pelaksanaan program seperti pemetaan wilayah rawan, penyuluhan masyarakat, dan distribusi air bersih; pemanfaatan sumber daya manusia dan prasarana yang tersedia; serta penguatan aspek kelembagaan melalui struktur organisasi dan koordinasi lintas sektor. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Merintha Suryapuspita dkk. (2022) di Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur air seperti sumur bor, tandon air, serta sosialisasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari strategi mitigasi. Namun, berbeda dengan penelitian di Bojonegoro yang mengembangkan jaringan pipa air dan waduk sebagai solusi jangka panjang, penelitian ini menunjukkan bahwa di Pamekasan strategi lebih difokuskan pada distribusi air bersih melalui tangki dan pemanfaatan tandon, serta program seperti BESTI BERDERING.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian oleh Desifa Ramdani Minhar dan Faizal Aco (2021) yang menyatakan bahwa strategi mitigasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Hal ini terbukti dari kebijakan yang dilaksanakan BPBD Pamekasan yang lebih menekankan pada edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan kekeringan, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Di sisi lain, berbeda dengan penelitian Fetria Septiarum dkk. (2023) yang menyoroti lemahnya aspek *actuating* (penggerakan) karena tidak adanya penanggung jawab yang ditunjuk secara khusus dan sistem tanggap darurat yang belum dievaluasi, penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Pamekasan telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta melakukan koordinasi aktif dengan pihak PDAM, Dinas Kesehatan, dan DKPP.

Temuan ini juga menolak generalisasi hasil penelitian sebelumnya oleh Rivi Neritarani (2019) di Kabupaten Semarang yang menekankan strategi mitigasi melalui pendekatan spasial (pemetaan potensi kekeringan dengan metode *weighted overlay*). Hal ini karena karakteristik wilayah, ketersediaan sumber daya, dan struktur sosial masyarakat di Pamekasan lebih memerlukan pendekatan berbasis partisipasi dan edukasi langsung kepada masyarakat daripada sekadar pendekatan spasial. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan secara terpadu sesuai kondisi lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan model mitigasi berbasis pemberdayaan masyarakat dan koordinasi kelembagaan yang adaptif terhadap tantangan kekeringan di wilayah kepulauan.

3.2. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan, terdapat temuan menarik yang tidak direncanakan dalam tujuan awal penelitian ini namun memiliki korelasi kuat terhadap pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Temuan tersebut yaitu adanya program inovasi dari BPBD Kabupaten Pamekasan berupa program BESTI BERDERING (BPBD Eksis Setiap Hari Bersama Distribusi Air Bersih

Secara Rutin dan Berkelanjutan), yang merupakan program unggulan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pamekasan dalam menanggulangi bencana kekeringan. Program ini dilaksanakan sejak bulan Juni hingga Desember setiap tahunnya dengan menyoar daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan. BESTI BERDERING juga melibatkan berbagai pihak seperti PDAM, DKPP, dan Dinas Kesehatan dalam proses pelaksanaan pendistribusian air bersih. Temuan lainnya adalah adanya sinergitas yang kuat antara BPBD Kabupaten Pamekasan dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi dan kolaborasi dalam bentuk rapat koordinasi, forum diskusi, dan pembagian tugas yang jelas dalam upaya penanganan kekeringan. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian air bersih menunjukkan antusiasme yang tinggi serta adanya rasa syukur terhadap bantuan yang diberikan. Namun di sisi lain, peneliti juga mencatat bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana masih tergolong rendah, terbukti dari minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif dan pendekatan kultural yang bisa menyentuh nilai-nilai lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi mitigasi bencana kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa strategi mitigasi yang dilakukan mengacu pada teori strategi Jack Kooten, yang meliputi strategi organisasi, strategi program, strategi sumber daya, dan strategi kelembagaan. BPBD Kabupaten Pamekasan telah menjalankan berbagai strategi seperti penyusunan visi, misi, tujuan organisasi; pelaksanaan program-program penyediaan air bersih dan edukasi masyarakat; pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan; serta penguatan kelembagaan melalui struktur organisasi, kewenangan, dan SOP. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, pelaksanaan strategi mitigasi masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Namun demikian, BPBD terus berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Hal ini mengakibatkan data yang diperoleh terbatas pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat pengumpulan data di lokasi penelitian, yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Arah masa depan penelitian ini mengarah pada perlunya kajian lebih lanjut mengenai peningkatan strategi mitigasi bencana kekeringan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Penelitian ke depan diharapkan dapat menggali peran serta teknologi digital dan sistem informasi dalam mendukung efektivitas pelaksanaan mitigasi, serta menelusuri lebih dalam model kolaborasi lintas sektor antara BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, diperlukan pengembangan metode partisipatif dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat yang berbasis potensi lokal dan

pendekatan budaya. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi kajian ke wilayah lain yang memiliki karakteristik kerentanan serupa guna memperkuat generalisasi strategi mitigasi yang efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta berbagai informasi penting selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Eviany, Eva. dan Sutiyo.2023.*Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*;Penerbit Nasmedia
- Desifa Ramdani Minhar & Faizal Aco. (2021). Mitigasi Bencana dalam Mengatasi Kekeringan di Kalurahan Gayamharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebencanaan*, 7(2), 45-59.
https://www.academia.edu/100182768/Mitigasi_Bencana_Dalam_Mengatasi_Kekeringan_Di_Kalurahan_Gayamharjo_Kapanewon_Prambanan_Kabupaten_Sleman_Daerah_Istimewa_Yogyakarta
- Fetria Septiarum, Maesaroh, & Nina Widowati. (2023). Manajemen Mitigasi Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Kekeringan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Manajemen Kebencanaan*, 10(1), 25-39.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/39730>
- Kooten, J. (2006). *Strategic Management: A Four-Dimensional Approach*. Jakarta: Salusu Publishing.
- Marton, Insani Andre (2019) *Mitigasi Bencana Kekeringan Pada Daerah Aliran Sungai Dumai Di Kota Dumai*. Other thesis, Universitas Islam Riau.
<https://repository.uir.ac.id/9064/>
- Merintha Suryapuspita, Anggara Setya Saputra, Suryoto, & Nidya Ayu Wulandari Ramdan. (2022). Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Kekeringan di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 120-134. <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/9088>
- Muhammad Arwan Rosyadi, Khaled Abdan, Willa Amanda Fricillya, Husniatun Nufus, Jannatul Fitrah, Lalu Rizki Aji Kertalam, Mirnawati, Rizka Amelia Putri, Ilza Lail Fatul Janna, dan Maulana Ananda Sami (2024). Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Kekeringan di Desa Salur Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Wicara Desa*, 1(2), 157-163
<https://journal.unram.ac.id/index.php/wicara/article/view/3450>
- Nugroho Kharisma, et al. (2009). *Kajian Kekeringan dan Dampaknya*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. https://eprints.ums.ac.id/30595/16/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Nurjanah. (2012). Manajemen Bencana: Proses dan Pendekatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 10-22.

- <https://penerbitgoodwood.com/index.php/Jasispol/article/download/184/100/1331>
- Rivi Neritarani. (2019). Identifikasi dan Strategi Mitigasi Bencana Kekeringan Potensial di Kabupaten Semarang. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 6(4), 78-92.
- <https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=cMfwVjIAAAAJ>
- Sambodo. (2018). *Pengelolaan Manajemen Bencana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soehatman. (2018). Pendekatan Mitigasi Bencana. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 14(2), 100-112.
- Wilhite, D. A. (2010). *Drought Preparedness and Mitigation*. International Water Management Institute.
- World Risk Report. (2023). *Global Disaster Risk Analysis*. Berlin: Bündnis Entwicklung Hilft.

